

Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA
Seprida Hanum, S.E., S.Si., M.Si.

Monograf
**Good
Governance**
dalam Pengelolaan
Dana Desa



Monograf
**Good
Governance
dalam Pengelolaan
Dana Desa**

Monograf
**Good
Governance
dalam Pengelolaan
Dana Desa**

**Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA
Seprida Hanum, S.E., S.Si., M.Si.**

Editor
Dr. Jufrizen, S.E., M.Si.

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.



DAFTAR ISI

Judul
Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa

Penulis
Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA
Seprida Hanum, S.E., S.Si., M.Si.

Editor
Dr. Jufrizen, S.E., M.Si.

Desain Sampul
Fimanda Arlita, S.Pd.

Cetakan Pertama; November 2022
(x + 118 hlm); 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-408-241-8
E-ISBN : 978-623-408-242-5 (PDF)

Penerbit



Redaksi

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238
Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296
Email; umsupress@umsu.ac.id
Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Anggota IKAPI Sumut, No: 38/ Anggota Luar Biasa/SUT/2020
Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018
Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah)

DAFTAR ISI	v
PRAKATA	vii
KATA PENGANTAR EDITOR	ix
BAB I	
GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN DANA DESA	1
A. Good Governance Pengelolaan Dana Desa	1
B. Kajian dan Fokus Permasalahan	14
BAB II	
GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA	17
A. Good Governance	17
B. Kualitas Pelaporan Keuangan	31
C. Kompetensi Sumber Daya Manusia	44
D. Teknologi Informasi	53
E. Sistem Pengendalian Intern	58
F. Komitmen Organisasi	65
G. Pengelolaan Dana Desa	71
H. Kajian Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa	74
BAB III	
PROSEDUR PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	85
A. Kajian Kualitatif dalam Penerapan Good Governance	85
B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penerapan Good Governance	86
C. Prosedur Pengumpulan Data	86
D. Analisa Kajian Penerapan Good Governance	87
BAB IV	
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN	

DANA DESA	89
A. Good Governance	89
B. Sumber Daya Manusia	91
C. Penggunaan Teknologi Informasi	91
D. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	93
E. Komitmen Organisasi	94
F. Pengelolaan Dana Desa	95
BAB V	101
PENUTUP	101
GLOSARIUM	105
DAFTAR PUSTAKA	107
INDEKS	113
TENTANG PENULIS	115
TENTANG EDITOR	117

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menghasilkan sebuah monograf yang ditulis berdasarkan hasil kajian. Semoga buku ini memberikan manfaat yang Insya Allah akan memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dan para dosen. Monograf ini ditulis berdasarkan hasil kajian yang berjudul adalah : **“Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa”** semoga apa yang dituliskan dalam karya ini akan memperkaya pengembangan ilmu Akuntansi. Namun penulis menyadari bahwa semua ini tidak kesalahan dan kekurangan, baik dari hasil analisis maupun pembahasan serta penulisan yang kurang pada tempatnya mohon disampaikan dalam kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan kajian selanjutnya. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya kajian ini. Terutama kepada suami tercinta Dr. Jufrizen, S.E, M.Si dan anakku tersayang Atthariq Daffa Zein yang telah menjadi inspirasi terbesarku. Selanjutnya ucapan terima kasih yang dalam juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor Prof. Dr. Agussani, M.AP beserta para Wakil Rektor, Ketua LP2M UMSU, Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Januri, SE, MM, M.Si, Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. Dan tidak lupa teman-teman dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU yang tidak dapat disebutkan satu

persatu terima kasih atas dukungannya. Demikian saya akhiri, semoga kajian ini bermanfaat, mohon maaf atas segala kekuarangan.

Medan, 11 September 2022

Dr. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si, CA

KATA PENGANTAR EDITOR

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang tak hentihentinya memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya, selanjutnya *salawat* dan *salam* kepada junjungan nabi Muhammad saw, seorang wali Allah yang membimbing kita kepada kehidupan bermakna dan bahagia. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkehan-Nya.

Konsep *good governance* adalah sebuah kerangka yang dianggap ideal yang dikeluarkan World Bank dalam membingkai kedewasaan negara-negara yang menjunjung tinggi akan kebebasan atau demokrasi. Kerangka *good governance* sangat tidak menginginkan peran negara yang mendominasi setiap sektor bernegara dan berbangsa. Kehadiran masyarakat sipil (*civil society*) dan swasta (*private sector*) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari elemen penting dari konsep demokrasi modern. Kehadiran pers, LSM, kelompok penekan dan kepentingan, atau ormas, termasuk perusahaan-perusahaan yang bebas dan mandiri adalah kedudukan yang sangat penting bagi kestabilan politik, ekonomi dan hukum di suatu negara. Baik pada tataran negara, maupun pada tingkat pemerintahan yang paling rendah seperti pemerintahan desa maka kehadiran kerangka *good governance* juga sangat dibutuhkan. Misalnya dalam pengelolaan kebijakan Dana Desa.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP, maka *good governance* setidaknya harus menjamin akan terciptanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum yang jelas. Maka dengan kedudukannya sebagai negara yang mengadopsi demokrasi modern dengan

sebuatan demokrasi Pancasila-nya, maka sudah seharusnya pengelolaan Dana Desa menjamin akan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Sebab, tak bisa dipungkiri dan tak bisa terbantahkan, bahwa tindakan amoral dalam mengurus Dana Desa kerap sekali terjadi di berbagai daerah yang menjadi momok terhadap semakin suramnya masa depan dan karakter bangsa ini. Sudahlah cukup bangsa ini terpuruk dengan berbagai yang terus menyiksa rakyat tersebut.

Di dalam buku ini dijelaskan, bahwa prinsip-prinsip *good governance* tersebut diwujudkan, salah satunya, dengan upaya melibatkan perangkat teknologi informasi dalam pengelolaan, pengadministrasian dan pengorganisasian Dana Desa. Kehadiran e-government memang telah terbukti diyakini menjadi jembatan solusi bagi masalah inefisiensi, korupsi dan berbagai manipulasi. Walaupun di sisi lain rentan terhadap peretasan data misalnya, namun setidaknya kehadiran teknologi informasi akan semakin mempermudah masyarakat dan pemerintah itu sendiri dalam mengakses dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Akhirnya, kami ucapkan selamat kepada penulis terhadap terbitnya buku ini, semoga dapat diterima secara luas dan terbuka dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan niat yang tulus semoga buku ini dapat menjadi amal jariyah bagi diri penulis. *Aamin.*

Medan, 16 Oktober 2022

BAB I

GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN DANA DESA

A. Good Governance Pengelolaan Dana Desa

Good Governance merupakan wujud dari suatu penerimaan akan pentingnya pengaturan dan tata kelola yang baik terhadap hubungan dan fungsi serta kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Hal ini menekankan pada segenap pemerintahan untuk menyediakan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja sektor publik untuk memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan didalamnya. Sejalan dengan ini penyelenggaraan prinsip Good Governance di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Good Governance menurut (Agus, 2010) “merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran pemangku kepentingan. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan social

yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak faktor lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda (Winarno, 2002).

Menurut (Kooiman, 2003) governance adalah aktifitas interaksi sosial politik antara penguasa dengan masyarakat luas yang berhubungan mengenai berbagai bidang keperluan masyarakat dan menuntut pemerintah atas keperluan-keperluan tersebut. (Ihyaul & Sofyani, 2016) juga mengungkapkan mengungkapkan bahwa good governan cemeliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. Good governancejuga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif,legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan yang baik secara konseptual, mempunyai pengertian bahwa katabaik atau Good dalam istilah pemerintahan yang baik yang memiliki makna bahwa Good Governance telah mengandung dua pemahaman : pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009).

Good governance juga merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2012).

Konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*) muncul karena adanya ketidak puasannya dari keinginan atau kehendak rakyat dalam persoalan pelayanan yang berorientasi pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercayasebagai / urusan publik. Mengenai *Good Governance* sebagian besar publik membayangkan bahwa dengan memiliki praktik Good Governance maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi semakin rendah, masalah penegakan hukum berjalan dengan lancar, dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur pelayananpublik. Dengan demikian pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip Good Governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu Good Governance

sangat penting diterapkan dalam pemerintahan untuk meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik, karena saat ini banyak para aparatur pelayanan public belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik cenderung lamban, kurang profesional sehingga masyarakat merasa jenuh terhadap pelayanan yang ada. Dalam hal ini peran kinerja memiliki kedudukan dan fungsi yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merupakan komitmen dari pemerintah, karena peranan kinerja di tengah masyarakat senantiasa menjadi kepuasan terhadap masyarakat dan menjadi tolak ukur kesejahteraan.

Sebagai gambaran buruk yang terjadi dalam suatu birokrasi dapat dilihat dari gemuknya birokrasi dan kewenangan antar lembaga tumpang tindih, sistem, metode, dan prosedur kerja belum tertib, pegawai negeri sipil belum profesional dalam pekerjaannya, belum netral dalam orientasinya, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar, koordinasi, integritas, dan sinkronisasi program belum terarah, serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah. Penerapan Good Government Governance memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan Good Governance menurut (Tunggal, 2012) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu: meminimalkan agency cost, meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki citra pemerintahan. Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksanaannya, yang pada hakekatnya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui desentralisasi dan demokratisasi. Kehadiran UU No.6 Tahun 2014 sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. UU no.6 tahun 2014 telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu prinsip good governance benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Good Governace akan tercapai apabila suatu daerah telah memenuhi prinsip- prinsip penerapan Good Governance. Prinsip-prinsip Good Governance terdiri dari, partisipasi masyarakat, penerapan hukum, tranparansi, daya tangkap, berorientasi pada consensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis (Rosidi, 2010).

Namun, tidak semua desa di daerah Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip Good Governace. Salah satunya adalah desa-desa yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Langkat. Penerapan prinsip-prinsip Good Governace dilingkungan pemerintahan desa di Kabupaten Langkat masih tergolong lemah. Hal

ini dapat dilihat dari berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah Desa. Ditambah lagi perilaku para aparatur Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya. Rendahnya prioritas dalam mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi yang terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan aparatur Desa.

Dalam pelaksanaan pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu Manusia Pelaksana, Partisipasi Masyarakat, Keuangan Daerah, Peralatan, dan Organisasi dan Manajemen (Yuanida, 2010). Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pelaporan keuangan Desa. Sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban.

Pelaporan Keuangan menurut (Baridwan, 2013) adalah sebagai "Informasi keuangan suatu organisasi

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, pelaporan keuangan menyangkut laporan keuangan utama yang terdiri atas neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan" Menurut (Bastian, 2013) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Pengelolaan keuangan desa menuntut kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang berusaha untuk menjawab tuntutan zaman, keterbatasan Sumberdaya manusia menjadi faktor penting untuk menciptakan Good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Good governance inilah

yang dibingkai melalui goal setting theory yang mencoba memberikan suatu alternatif pilihan yang pada tujuannya untuk memberikan keselarasan dan harmoni bagi kepentingan stakeholder (pemerintah, masyarakat desa, aparatur desa) secara keseluruhan.

Dalam melakukan pelaporan keuangan, setiap pemerintahan desa diuntut untuk menerapkan ketransparansian sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Transparansi Dana Desa Pemerintah utamanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pelaporan publikasi laporan keuangan desa dalam bentuk baliho. Hasil pengamatan yang dilakukan penulis di beberapa Desa di Kabupaten Langkat, penerapan transparansi pada lingkungan pemerintahan desa juga tergolong lemah dilihat masih banyak Desa yang belum menerapkan pelaporan realisasi keuangan Desa dalam bentuk baliho. Selain itu, hasil informasi laporan keuangan Alokasi Dana Desa, dan realisasi dana desa dimana dalam pencatatan laporan tidak dapat dipahami oleh masyarakat, kemudian netralitas pelaporan tidak ditujukan kepada umum melainkan informasi keuangan hanya disampaikan kepada pihak tertentu saja.

Menurut (Efendi, Darwanis, & Abdullah, 2017) mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas aparatur sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM

(Sumber Daya Manusia). Kenyataannya, di lingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat masih terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, dengan katalain pengetahuan dan keterampilan petugas tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan tersebut. Hal tersebut menjadi kendala dalam menyampaikan laporan keuangan dikarenakan pegawai belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Selain itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Menurut (Sugijanto., 2002) peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tegas bahwa salah satu Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa adalah pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi berupa Akses internet untuk warga Desa dan Website Desa. Dalam penerapannya, masih terdapat banyak kantor pemerintahan desa yang belum memiliki atau membangun fasilitas internet yang dapat di gunakan oleh

masyarakat Desa. Selain itu, penyampaian Informasi Keuangan juga belum sepenuhnya menggunakan sistem komputerisasi.

Selain penggunaan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengawasan keuangan juga turut menentukan kualitas pelaporan keuangan. Karena pada akhirnya, diperlukan suatu proses pengawasan keuangan daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Yosa, 2010). Namun yang terjadi saat ini Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat tidak belum sepenuhnya mampu menciptakan kualitas pelaporan keuangan. Ketidak optimalnya penerapan system pengendalian intern di lingkungan pemerintahan desa di kabupaten langkat terjadi akibat penilaian resiko yang diterapkan. Pemerintah Desa tidak memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Pemerintah Desa tidak dikomunikasikan kepadaseluruh petugas pengurus desa dan musyawarah terbuka kepada warga masyarakat Desa.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik

atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu (Trisaputra,2013). Menurut (Tampubolon & Basid, 2019); (Pranata, 2019) Komitmen Organisasi juga dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi (Kreitner & Kinicki, 2017). Selain itu (Robbins & Judge, 2013) juga mendefinisikan bahwa Komitmen Organisasi sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Komitmen organisasional merupakan keterikatan emosional, identifikasi keterlibatan pegawai terhadap satu institusi. Manfaat dari komitmen pegawai yang tinggi akan meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat keluar masuknya pegawai, serta meningkatkan kualitas manajerial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa petugas pemerintahan desa di Kabupaten Langkat yang kurang peduli akan kepentingan dan tujuan dari organisasi serta melalaikan pekerjaan dengan sengaja tanpa memperdulikan nilai-nilai dan norma yang ada dalam lingkungan organisasi.

Seseorang yang memiliki komitmen terhadap suatu organisasi dapat dilihat dari segi komitmen afektif, yaitu perasaan emosional yang dimilikinya terhadap organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya, Kemudian dari segi komitmen berkelanjutan yang merupakan pemikiran akan manfaat yang diperoleh jika bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan

meninggalkan organisasi tersebut. Selanjutnya komitmen seseorang terhadap suatu organisasi dapat dilihat dari segi komitmen normatif yang merupakan pemikiran bahwa ia memiliki rasa kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis (Bangun, 2013).

Kajian mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan implikasinya terhadap good governance sudah pernah dilakukan oleh (Sari, 2012) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan menunjukkan hasil bahwa Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Good Governance. Kemudian kajian yang dilakukan oleh (Afiah, 2009) menunjukkan hasil kajian yang dilakukan pada 7 (tujuh) Pemda di Indonesia tersebut bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif yang moderat untuk tata kelola pemerintahan yang baik. (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019), menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan laporan keuangan desa tetapi kualitas SDM sebaliknya. Sementara (Nurillah, 2014), menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Studi lain mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Pengendalian Internal (Wardani & Andriyani, 2017). Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah. Komitmen organisasi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan seperti

yang dikemukakan (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019), dan (Mulyaningsih, 2014) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan desa juga tidak terlepas dari pengaruh tenaga pendamping desa sesuai dengan Peraturan menteri desa, PDT dan Transmigrasi nomor 3 Tahun 2015 seperti kajian (Kartika, 2015), (Ismail, 2016) dan (Budiarti, 2016), yang dilakukan secara kualitatif menyatakan bahwa lemahnya kualitas pelaporan keuangan desa disebabkan karena belum adanya tenaga pendamping desa yang bisa membantu desa dalam pengelolaan dana desa.

Kajian lain juga dilakukan oleh (Wiguna, Yuniarta, & Prayudi, 2017) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng) mengemukakan hasil bahwa bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Peran pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes. Kemudian kajian yang dilakukan oleh (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019) dengan judul Determinan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan

pengelolaan keuangan desa. Sedangkan komitmen organisasi memang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Kajian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa mengemukakan hasil Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Peran pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes

B. Kajian dan Fokus Permasalahan

Model Resiko Manajemen Berbasis Good Governance pada Perusahaan Perbankan di Indonesia diharapkan dapat memudahkan perbankan untuk mengidentifikasi masalah sejak dini, menindaklanjuti perbaikan yang cepat, dan lebih tangguh untuk krisis, sehingga perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan melalui Good governance yang baik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana *Good Governance* pada pemerintahan desa di Kabupaten Langkat ?

3. Bagaimana *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Langkat ?

BAB II

GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

A. Good Governance

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011). Good Governance menurut (Agus, 2010) “merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran pemangku kepentingan. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini

mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak faktor lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda (Winarno, 2002). Menurut (Kooiman, 2003) governance adalah aktifitas interaksi sosial politik antara penguasa dengan masyarakat luas yang berhubungan mengenai berbagai bidang keperluan masyarakat dan menuntut pemerintah atas keperluan-keperluan tersebut. (Ihyaul & Sofyani, 2016) juga mengungkapkan mengungkapkan bahwa good governan cemeliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. Good governance juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif,legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan yang baik secara konseptual, mempunyai pengertian bahwa kata baik atau Good dalam istilah pemerintahan yang baik yang memiliki makna bahwa Good Governance telah mengandung dua pemahaman : pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009). Selain itu

(Sedarmayanti, 2012) juga menjelaskan good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

2.1.1 Manfaat Good Governance

Penerapan Good Government Governance memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat padamaupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan Good Governance menurut (Tunggal, 2012) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu :

1. Meminimalkan agency cost

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

2. Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan

3. Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan

keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

Manfaat dari penerapan good governance tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat good governance ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah.

2.1.2 Tujuan Good Governance

Penerapan pelaksanaan prinsip Good Government Governance secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan good government governance adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut (Tunggal, 2012) Tujuan dari Good Government Governance adalah, tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik, Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan."

Menurut (Mardiasmo, 2009) tujuan dari penerapan *good government governance* adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri. Untuk mewujudkan itu, maka dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diharapkan para pelaku atau pilar- pilarnya membangun kolaborasi, *networking*, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Implementasi *good government governance* dalam penyelenggaraan Negara bukan perkara mudah. Kendala-kendala siap menghadapi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, kendala-kendala itu bersumber pada pelaku-pelakunya sendiri dan sistem yang melingkunginya.

Pendapat lain juga mengemukakan Tujuan Good Governance menurut (Kurniawan, 2005), sebagai berikut "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat".

2.1.3 Prinsip-Prinsip Good Governace

Kunci utama memahami good government governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government governance.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip -prinsip good governance

sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan Menurut (LAN & BPKP, 2003) prinsip – prinsip Good Governance, sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Tegaknya Supremasi Hukum menjelaskan bahwa kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu Negara harus adil dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu Negara mengatur jalannya pemerintahan yang baik.

4. Transparansi

Transparansi dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti.

5. Peduli pada Stakeholder

Peduli pada Stakeholder ini yaitu lembaga – lembaga harus melayani semua pihak yang berkepentingan sesuai standar yang berlaku.

6. Berorientasi pada Kasus

Berorientasi pada Konsensus yaitu menjadi suatu jembatan untuk kepentingan - kepentingan atau bidang - bidang yang berbeda guna terbangunnya masa depan yang baik untuk se kelompok masyarakat terutama dalam kebijakan dan prosedur.

7. Kesetaraan

Kesetaraan yaitu semua masyarakat berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterahkan diri mereka sendiri.

8. Efektivitas dan Efisien

Efektifitas dan Efisiensi yaitu suatu proses pemerintahan harus mengelola sumber- sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai kebutuhanyang diperlukan.

9. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu dapat terjadi di semua organisasi yaitu bentuk suatu pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pertanggungjawabannya yaitu bisa dalam bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya.

10. Visi Strategis

Visi strategis yaitu prinsip ini diutamakan untuk para pemimpin dan masyarakat untuk memikirkan perspektif yang jauh ke depan untuk tata pemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009) terdapat prinsip-prinsip good government governance, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (Accountability)

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan

tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

2. Transparansi (Transparency)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

3. Demokrasi (Democraton)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

4. Aturan hukum (Rule Of Law)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Subrayaman dkk (2008), yaitu :

1. Transparansi (Transparency)

Keterbukaan/ transpansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan

dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

3. Responsibilitas (Responsibility)

Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

4. Independensi (Independency)

Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance), pemerintah harus dapat dikelola secara independen.

5. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)

Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan

Selanjutnya menurut (Rosidi, 2010) baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi (Participation)

Setiap warga masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan sah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penerapan Hukum (Rule of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (impartialy), terutama tentang aturan hukum dan menyangkut hak azasi manusia (HAM).

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Keadilan (Fairness)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektifitas dan Efisiensi

(Effectiveness and Efficiency) Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani

memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung kepada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek aspek historis, kultur dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik baiknya. Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara. Prinsip-prinsip good governance tersebut dalam akuntansi sektor publik berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

2.1.4 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance

Seperti yang dijelaskan oleh (Yuanida, 2010) dalam pelaksanaan tugas (task) pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu:

1. Faktor Manusia Pelaksana (Man)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governance sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (local government) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

2. Faktor Partisipasi Masyarakat (public participation)

Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam system pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian good government governance adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (decision making);
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (actuation participation);
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (cost benefit evaluation);

d. Partisipasi dalam evaluasi (evaluation participation).

3. Faktor Keuangan Daerah (funding or budgeting)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian good governance di daerah / lokal membutuhkan dana/finansial.

4. Faktor Peralatan (tools)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian good governance. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan good government governance.

5. Faktor Organisasi dan Manajemen (Organization and management)

Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan good governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar good government governance dapat terwujud Selanjutnya (Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha 2017) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip

Good Governance adalah Partisipasi masyarakat, Sumber, daya manusia Kedisiplinan, Komunikasi, dan Kerjasama.

B. Kualitas Pelaporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban atas suatu instansi pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk kinerja instansi baik daerah maupun pusat. Laporan keuangan instansi adalah bagian dari proses pelaporan keuangan instansi Menurut (Fahmi, 2011) laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Harahap (2016: 105) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Adapun jenis laporan keuangan yang dikenal adalah Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut (IAI, 2012) mengemukakan bahwa: "Pengertian laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas

(cash flow), dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya”.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan” (Bastian, 2013). Sementara menurut (Mahmudi, 2013) menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”. Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah yang berguna (useful) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (information content). Laporan keuangan akan berguna apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Adhi & Suhardjo, 2013).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007).

Menurut PP No 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengemukakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan..

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Laporan Keuangan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini dilakukan dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan PPKD (Efrianti, 2014). Dalam PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 17 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan pemerintah yaitu, (1) Masyarakat, (2) Para wakil rakyat, Lembaga pengawas, Lembaga pemeriksa, (3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; (4).Pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya

ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disu-sun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

2.2.2 Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP No 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 28 komponen laporan keuangan

pokok terdiri dari; (1) Laporan realisasi anggaran (LRA); (2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan perubahan SAL); (3).Neraca; (4) Laporan operasional (LO); (5) Laporan perubahan ekuitas (LPE); (6) Catatan atas laporan keuangan (CaLK). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abdul Hafiz Tanjung (2014:12) komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut (1) Laporan Realisasi

Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2.3 Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam

pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014). Menurut (Defitri, 2018) kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Menurut (Harahap, 2013) bahwa “Kualitas Pelaporan keuangan merupakan criteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Menurut (Rasdianto, 2013) “kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Kemudian menurut (Bastian, 2013) kualitas pelaporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.” Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 32 ayat 2 kualitas pelaporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh suatu entitas pelaporan.

2.2.4. Tujuan Pelaporan keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Siti dan Aida 2012). Sedangkan menurut (Halim, 2007) menyatakan tujuan pelaporan keuangan daerah adalah menyajikan laporan tentang Posisi keuangan, Realisasi anggaran, Arus kas, Kinerja pelaporan keuangan. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 26 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang bergina dan bermanfaat bagi pemakainya guna untuk pengambilan keputusan. Berikut tujuan leporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
5. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

2.2.5 Indikator Kualitas Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Financial Accounting Standard Board (FASB, 2001), mengemukakan kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya (reliability). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (feedback value), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai

dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten. Pendapat serupa dikemukakan oleh (Munawir, 2014) Indikator Kualitas

Laporan Keuangan yaitu:

1. Relevan

Dikatakan relevan ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penyajian laporan keuangan secara jujur.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya. 4. Dapat dipahami Informasi yang tersedia dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Sedangkan menurut (Putra, 2013) karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai dengan aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. Relevan

Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dan mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang.

3. Keandalan/Reliabilitas

Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tepat.

4. Dapat dibandingkan

Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan

5. Netral

Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.

6. Tepat waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkannya informasi tersebut.

7. Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembaca.”

Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat, yang mencakup kerugian daerah.

2. Value for Money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (Probity)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi keuangan daerah.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup Kekurangan penerimaan

2.2.6 Faktor - Faktor Kualitas Pelaporan Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan intansi menurut (Setyowati, 2016), yaitu :40

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (SIKDA) menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan

keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

2. Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dalam perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

3. Peran Internal

Internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan mengingatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Selanjutnya (Efendi, Darwanis, & Abdullah, 2017) dalam kajiannya mengemukakan faktor -faktor yang

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas aparatur sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah. Pendapat lain mengemukakan bahwa Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan organisasi karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang. (Munawir, 2014). Kualitas Informasi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Munawir, 2014).

C. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.3.1 Pengertian Kompetensi Sumberdaya Manusia

Menurut Sedarmayanti (2014:286), Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang secara kausal terkait dengan kriteria yang direferensikan secara efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi. Pendapat serupa dikemukakan oleh Moeheriono (2014:5) bahwa Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individual dalam perkerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ruky (2013:106) mendefinisikan kompetensi sebagai kombinasi dari

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Sedangkan menurut International Federation of Accountants (2014) kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu peran kerja dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja.

Untuk menunjukkan kompetensi dalam suatu peran, seorang akuntan profesional harus memiliki, pengetahuan profesional, keterampilan profesional, dan nilai-nilai profesional, etika, dan sikap. Kemudian menurut Wirawan (2015:9) mendefinisikan Kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif." Hutapea dan Thoha (2008:28) juga menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut : "Kemampuan dan kemauandalan melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan." Sedangkan pengertian kompetensi menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan kompetensi sebagai berikut : "Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan."

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kompetensi adalah seperangkat perilaku kinerja individu yang dapat

diamati, terukur dan sangat penting untuk keberhasilan kinerja pada individu itu sendiri maupun pada perusahaannya. Perilaku kinerja individu tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik yang terkait dengan aspek kinerja praktik profesi

2.3.2 Jenis-Jenis Kompetensi Sumber Daya Manusia

Jenis kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, dan beberapa tipe kompetensi tersebut menurut Wibowo (2013:97) adalah sebagai berikut :

1. Planning Competency,

Merupakan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.

2. Influence Competency,

Merupakan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.

3. Communication Competency,

Merupakan bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

4. Interpersonal Competency,

Merupakan empati, pembangunan konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player. Thingking Competency, Berkenaan dengan berpikir

strategis, berpikir analisis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, ngidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

5. Organizational Competency,

Meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

6. Human Resources Management Competency,

Merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partiipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.

7. Leadership Competency

Merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam memposisikan diri, mengembangkan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan tempat kerja.

8. Client Service Competency,

Merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.

9. Business Competency,

Merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis,

membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan

10. Self Management Competency,

Kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.

11. Technical/Operasional Competency, Kompetensi yang berkaitan dengan: mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

Menurut Michael Zwell memberikan lima kategori kompetensi (2013:330), yang terdiri dari :

1. Task achievement

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.

2. Relationship

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi berhubungan dengan relationship meliputi: kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antarpribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan,

penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

3. Personal attribute

Merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.

4. Managerial

Merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi managerial berupa memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

5. Leadership

Merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai.

2.3.3 Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Ruky (2013:107) mengatakan bahwa terdapat berbagai alasan dan manfaat kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai

Keterampilan, pengetahuan dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Dan perilaku apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja.

2. Alat seleksi karyawan

Penggunaan kompetensi sebagai alat seleksi karyawan dalam organisasi untuk memilih calon karyawan terbaik yaitu diharapkan adanya kejelasan perilaku dari karyawan, sasaran yang efektif, memperkecil biaya rekrutmen.

3. Memaksimalkan produktivitas

Mencapai karyawan bila dikembangkan untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilan sehingga mampu maksimal dalam bekerja.

4. Dasar pengembangan sistem remunerasi

Untuk mengembangkan sistem remunerasi akan terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu perilaku yang diharapkan dan yang ditampilkan dari seorang karyawan.

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan

Untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.

6. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi

Untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

2.3.4 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya adalah tolak ukur yang dapat dijadikan patokan atau perbandingan agar bisa mengetahui sumber daya yang berkualitas. Dengan adanya batasan atau tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi sumber daya manusia. Menurut Sedarmayanti (2014:286) menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari :

1. Pengetahuan (knowledge),

Mencakup pengetahuan standar akuntansi pemerintahan, pengetahuan mengenai kegiatan instansi yang berhubungan dengan keuangan dan pengetahuan perkembangan teknologi informasi dalam akuntansi.

2. Keterampilan (skill),

Mencakup keterampilan mengenai fungsi akuntansi untuk setiap transaksi, keterampilan berorganisasi, dan keterampilan komunikasi yang efektif.

3. Sikap (attitude),

Memiliki komitmen untuk kepentingan publik dan sensitivitas terhadap tanggung jawab sosial, pengembangan diri dan belajar serta terus menerus, dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai, menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Hutapea dan Nurianna 2008, bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yaitu berkekrativitas dalam bekerja. Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Sutrisno (2011:204) dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut :

1. Pengetahuan(knowledge)

Kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan efektif dan efisien di perusahaan.

2. Pemahaman (understanding)

Kedalam kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien

3. Kemampuan/Keterampilan (skill)

Sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.

4. Nilai (value)

Suatu standar perilaku yang telah ditakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam

melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).

5. Sikap (attitude)

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.

6. Minat (interest)

Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas Sumber daya manusia dapat tetap bertahan karena mereka memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan (Sutrisno, 2011:205).

D. Teknologi Informasi

2.4.1 Defenisi Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keraskomputer. Sutarman (2012:13). Sutabri (2012:3) menyatakan bahwa "Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat

dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan.

Mulyadi (2014: 21) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi." Definisi teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar".

Beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Sutarman (2012:17), mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah, untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Teknologi informasi menurut Sutarmn (2012:18) memiliki fungsi untuk menyatakan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis

kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

Menurut Kadir (2014:12), juga mengemukakan bahwa fungsi teknologi informasi adalah:

1. Untuk menggantikan peran manusia. dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan - perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

2.4.3 Indikator Teknologi Informasi

Nur Maflikhah (2010) memberikan beberapa dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektivitas, dengan dimensi-dimensi masing masing yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kemanfaatan
 - a. Menjadi pekerjaan lebih mudah (makes job easier)
 - b. Bermanfaat (usefull)c
 - c. Menambah produktifitas (increas productivity).
2. Efektivitas
 - a. Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness)
 - b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve the job performance)".

Kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi itu sendiri dapat diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunaannya. Adapun alat ukur dari Teknologi Informasi dapat diukur melalui komponen teknologi informasi menurut M. Suyanto 2005:11 yaitu:

1. Perangkat Keras Komputer Hardware

Perangkat keras bagi sesuatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.⁵³

2. Perangkat Lunak Komputer Software

Seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna Contohnya: e-commerce, DSS Decision Support System, e- banking, SAP, dan sebagainya.

3. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk memepermudah dan menjaga kualitas kualitas hubungan melalui internet.

Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

4. Database

Wadah atau file yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik dari proses penggunaan sistem.

5. Personalia Teknologi Informasi

Adanya operator computer, analis system, pembuat program, personalia penyiapan data, pemimpin system informasi.

Kemudian William Sawyer 2007:4-5 menyatakan bahwa Teknologi Informasi terdiri dari dua komponen yaitu

1. Teknologi Komputer

Mesin yang bisa diprogram dan memiliki beragam fungsi untuk menerima data, baik data mentah maupun angka, lalu memproses dan mengubahnya ke dalam bentuk informasi yang bisa kita manfaatkan.

2. Teknologi Komunikasi

Terdiri dari sistem dan peralatan elektromagnetik untuk berkomunikasi jarak jauh yang tehubung melalui sumber informasi melalui jaringan. Jaringan itu adalah sistem komunikasi yang menghubungkan dua komputer atau lebih.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur dari Teknologi Informasi dapat diukur melalui komponen teknologi informasi menurut M. Suyanto 2005:11 yaitu, Perangkat Keras computer Hardware, Perangkat Lunak Komputer Software,

Jaringan dan Komunikasi, Database, Personalia Teknologi Informasi

E. Sistem Pengendalian Intern

2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian

intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20). Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Mayangsari & Wandanarum (2013:59) :“Pengendalian internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan,

mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang terstruktur serta kumpulan berbagai komponen pengendalian dan aktivitas operasional organisasi/perusahaan yang terintegrasi dan digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang dapat dilihat dari terciptanya keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, keamanan kekayaan organisasi serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal yang efektif merupakan komponen kritis yang digunakan manajemen dan dasar bagi kegiatan operasional yang aman dan sehat dalam sebuah organisasi/perusahaan.

2.5.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat

3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pendapat lain juga menyatakan, Arens (2008:316), tujuan pengendalian intern adalah :

1. Keandalan Laporan Keuangan.

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti General Accepted Accounting Prinsiple (GAAP).

2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi.

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Perusahaan publik, perusahaan non publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa “Pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Menurut Mulyadi (2010:163)“Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efesiens, dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.5.3 Indikator Sitem Pengendalian Intern

Dalam hal pencapaian keberhasilan dalam penerapan pengendalian internal maka harus diperhatikan juga unsur-unsur pengendalian internal. Adapun beberapa unsur pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui Penegakan integritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah, saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah, mengandung unsur kriteria pengukuran, didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, Pembinaan sumber daya manusia, c. Pengendalian atas

pengelolaan sistem informasi, Pengendalian fisik atas asset, Penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja, Pemisahan fungsi, Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Dan Reuiu Lainnya

Sedangkan Menurut Mulyadi (2010:427-428)“Unsur-unsur Pengendalian Internal kas” adalah, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup

terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Menurut Indra Bastian (2011) bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacupada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

F. Komitmen Organisasi

2.6.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan rasa untuk tetap mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi dan tetap berusaha dengan segala kemampuannya demi tercapainya tujuan dan kepentingan organisasi. Menurut Indra Kharis (2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Kemudian Moorhead dan Griffin (2015,p.134) mengemukakan, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi.

Selain itu Kreitner dan Kinicki (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah

kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan Komitmen Organisasi sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata lain, komitmen organisasional berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan.

Komitmen organisasi adalah hal yang berharga untuk seluruh organisasi, dan bukan hanya untuk pekerjaan, maupun kelompok kerja. Komitmen karyawan sendiri bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi itu sendiri Lambert et al, dalam Wibawa (2015). Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis seorang pemimpin organisasi dalam memberikan keyakinan, kepercayaan dan kepatuhan dengan sikap profesional guna mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk mempengaruhi demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia mampu memotivasi setiap anggota organisasi.

2.6.2 Dimensi Komitmen Organisasi

Menurut Wilson Bangun (2014,p.312) menyatakan bahwa ada tiga dimensi komitmen organisasi adalah :

1. Komitmen Afektif

Komitmen Afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.

Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya Karena keterlibatannya dengan hewan-hewan.

2. Komitmen Berkelanjutan

Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomis yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarga.

3. Komitmen Normatif

Komitmen Normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Sebagai contoh seorang karyawan yang memelopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi.

Robbins (2008; 101) mengelompokkan komitmen organisasi dengan tiga indikator yang terpisah, yaitu :

1. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*)

Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan di dalam nilai-nilainya. Seseorang yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam suatu organisasi karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut

2. Komitmen Berkelanjutan (*Continuance Commitment*)

Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi

dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin bertahan dan berkomitmen dengan organisasi dan pemberi kerja karena diberi imbalan yang cukup tinggi. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu organisasi karena mereka membutuhkannya.

3. Komitmen Normatif (*Normative Commitment*)

Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan di dalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk melakukannya. Dengan kata lain, komitmen normatif ini berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam sebuah organisasi.

Komitmen afektif (*Affective Commitment*), komitmen berkelanjutan (*Continuance Commitment*), dan komitmen normatif (*Normative Commitment*), dapat digunakan dalam menguji komitmen organisasi pada pemerintah daerah. Seorang aparatur pemerintah daerah yang berkerja dalam suatu organisasi harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya.

2.6.4 Indikator Komitmen Organisasi

Cut Zurnali (2010) mendefinisikan masing-masing indikator komitmen organisasional tersebut sebagai berikut :

1. Komitmen afektif (*affective commitment*)

Komitmen afektif adalah perasaan cinta pada suatu organisasi yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial serta

menghargai nilai hubungan dengan organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.

2. Komitmen kontiniu (*continuance commitment*)

Komitmen kontiniu adalah perasaan berat untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam organisasi.

3. Komitmen normatif (*normative commitment*)

Komitmen normatif adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan.

Menurut Wilson Bangun (2014,p.312) menyatakan bahwa ada tiga indikator komitmen organisasi adalah:

1. Komitmen Afektif

Komitmen Afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya Karena keterlibatannya dengan hewan-hewan

2. Komitmen Berkelanjutan

Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomis yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarga.

3. Komitmen Normatif

Komitmen Normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Sebagai contoh seorang karyawan yang memelopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi.

Mowday (2000) mendefinisikan tiga indikator mengenai komitmen karyawan dalam organisasi adalah sebagai berikut:

1. *Affective Commitment*

Komitmen yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Seseorang ingin berada dalam suatu organisasi karena keinginan yang timbul dari diri sendiri.

2. *Continuance Commitment*

Komitmen yang timbul karena adanya kebutuhan rasional. Komitmen ini muncul atas dasar untung rugi, dipertimbangkan hal apa yang harus dikorbankan bila akan menetap didalam suatu organisasi, dengan dimensi pilihan lain, benefit, biaya.

3. *Normative Commitment*

Komitmen yang bersumber pada norma yang ada dalam diri individu, yang berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi, dirinyamerasa harus bertahan karena alasan loyalitas Menurut Robbins (2008) menyatakan bahwa terdapat 3 macam indikator komitmen organisasional yaitu : Komitmen Afektif , Komitmen Normatif, dan Komitmen Berkelanjutan.

Indikator komitmen organisasi menurut Indra Kharis (2010) indikator yaitu:

1. Kemauan.

Kemauan adalah rasa peduli atau bersedianya seorang karyawan dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan itu timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta mereka terhadap organisasi, teman sepekerjaan ataupun faktor lain yang mendukung karyawan tersebut untuk berkomitmen dalam organisasi.

2. Kesetiaan.

Kesetiaan karyawan terhadap tempat mereka bekerja merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh pihak perusahaan, dikarenakan dengan memiliki rasa setia pada setiap diri para karyawannya akan menimbulkan sikap loyalitas dan pastinya akan terus memegang komitmen dalam organisasi tersebut sekalipun mereka telah ditawarkan di perusahaan lain.

3. Kebanggaan pada organisasi.

Rasa bangga pada suatu organisasi merupakan tujuan dalam berorganisasi karena rasa bangga yang timbul berawal dari rasa cinta dan setia kepada organisasi serta didukung dengan sikap tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dan perlahan-lahan proses itu mencapai suatu keberhasilan dan rasa bangga akan timbul dalam organisasi tersebut.

G. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa..."). Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut di kelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan wajib menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri atas Sekertaris desa, Kepala seksi dan Bendahara desa. Sekertaris selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertugas untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa. Laporan yang disampaikan oleh kepala desa

tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah di tetapkan dengan peraturan desa dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan yang di maksud harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2016, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa meliputi keseluruhan kegiatan yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut (Harahap, 2015 :66), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu Adapun jenis laporan keuangan dana desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, laporan realisasi penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Menurut (Soleh dan Rochmansjah, 2015 :43), menyatakan

bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APB Desa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dari definisi diatas ada beberapa peraturan dalam pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dalam kajian ini yaitu Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup keseluruhan kegiatan yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Adapun indikator Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut : Menurut (Soleh dan Rochmansjah, 2015:43), menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator : a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Penatausahaan d) Pelaporan dan e) Pertanggung jawaban keuangan.

H. Kajian Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kajian sebelumnya banyak dilakukan Kajian sebelumnya banyak dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Asni, 2013; Putra dkk., 2013; Thomas, 2013; Azwardi dan Sukanto, 2014; John, 2015), serta kajian konsep akuntabilitas sebagai salah satu komponen *good governance* (Santoso dan Pambelum, 2008). Pentingnya akuntabilitas ditekankan pada *non government organization* sebagai organisasi nirlaba (Gray *et al.*, 2006; Unerman dan O'Dwyer, 2006; Chalhoub, 2009). Kovach *et al.* (2003) meneliti akuntabilitas pada tiga bentuk organisasi yaitu *intern governmental organization, transactional corporation,*

dan *non-governmental organization*. Pentingnya implementasi akuntabilitas juga diteliti pada kegiatan penyaluran dana bergulir untuk memberdayakan kaum miskin di Zambia (Dixon *et al.*, 2006), dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran publik di negara berkembang (Iyoha dan Oyerinde, 2010).

Sebagai mana yang dikemukakan oleh (Sedarmayanti 2012) *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam melaksanakan penyediaan publik *goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut *governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri (Yuanida 2010). Oleh sebab itu penggunaan Sumber Daya Manusia yang berkompeten merupakan faktor penting dalam menunjang tercapainya *Good Governance*. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Ardiyanti & Supriadi, 2016); (Pituringasih, Asmony, & 76 Basuki, 2020) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh yang positif terhadap implementasi *Good Governance*.

Menurut (Yuanida 2010) peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap

alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good government governance*. Menurut (Sutabri 2012) menyatakan bahwa “Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan. Dari penjelasan diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa untuk mencapai prinsip-prinsip *Good Governance* tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Kajian yang dilakukan oleh (Suryandari, 2015) mengungkapkan bahwa teknologi informasi memberikan efek positif dan signifikan pada tata pemerintahan yang baik (*Good Governace*). Selain itu kajian yang dilakukan oleh (Pituringasih, Asmony, & Basuki, 2020) mengemukakan bahwa Teknologi informasi secara signifikan terhadap terhadap *good governance*.

Penerapan *good goverment governance* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri (Mardiasmo, 2009). Untuk mewujudkan itu, maka dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi, *networking*, dan peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Implementasi *good goverment governance* dalam penyelenggaraan Negara bukan perkara mudah. Kendala-kendala siap menghadapi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, kendala-kendala itu bersumber pada pelaku-pelakunya sendiri dan sistem yang melingkunginya. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016). Kajian yang dilakukan oleh (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penerapan *Good Governance*. Hasil serupa dikemukakan oleh (Prabawa, Karamoy, & Mawikere, 2015) bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan *good governance*.

Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan Komitmen Organisasi sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata lain, komitmen organisasional berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan. Selain itu Kreitner dan Kinicki (2017)

mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Menurut (Yuanida 2010) Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan good governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar good government governance dapat terwujud. Kajian yang dilakukan oleh (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Good Governance. Hasil serupa juga dikemukakan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kualitas laporan keuangan merupakan kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Selain itu, (Harahap 2013), bahwa :“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi

keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Menurut Yuanida (2010) dalam pelaksanaan tugas pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu, faktor Manusia Pelaksana, faktor Partisipasi Masyarakat (public participation), Faktor Keuangan Daerah (funding or budgeting), Faktor Peralatan (tools), Faktor Organisasi dan Manajemen (Organization and management) Selanjutnya (Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha 2017) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip Good Governance adalah Partisipasi masyarakat, Sumber, daya manusia Kedisiplinan, Komunikasi, dan Kerjasama. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019), diperoleh hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mempengaruhi penerapan Good Governance.

Menurut Harahap (2013:146), mengemukakan bahwa :“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kemudian Rasdianto (2013:21), juga mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Setyowati (2014) mengemukakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan intansi, yaitu, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi sumber daya manusia, dan Peran Internal. Selanjutnya (Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah 2017) dalam kajiannya mengemukakan faktor -faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas aparatur sumber daya mausia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah Pendapat lain juga mengemukakan bahwa Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan organisasi karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang. Kualitas Informasi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Munawir, 2014:9). Kajian yang dilakukan oleh (Wiguna, Yuniarta, & Prayudi, 2017), menunjukkan hasil bahwa Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes. Selain itu kajian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) menunjukkan hasil bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Berbeda dengan kajian yang dilakukan (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019),

dimana dalam kajiannya memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Rasdianto (2013:21), bahwa :“ kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Kualitas Pelaporan Keuangan dapat dipengaruhi beberapa faktor, (Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah 2017) dalam kajiannya mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah, pemanfaatan teknologi informasi. Mulyadi (2014: 21) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.” Definisi teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”. Keterkaitan teknologi informasi dapat kita lihat dari segi tujuan dari suatu teknologi informasi. Sutarman (2012:17), mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah, untuk memecahkan masalah, untuk

membuka kreativitas dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bastian (2010:9) bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.” Terdapat banyak kajian yang telah mengkaji keterkaitan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Kajian yang dilakukan oleh (Pituringih, Asmony, & Basuki, 2020) menyatakan Teknologi informasi secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan serta pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap good governance.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20). Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong

efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Mulyadi (2010:163). Menurut Setyowati (2014), Mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal, atau faktor internal. Sistem

Pengendalian Intern membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi Setyowati (2014). Terdapat beberapa kajian yang telah mengkaji keterkaitan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Kajian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan.

Moorhead dan Griffin (2015,p.134) mengemukakan, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Selain itu Kreitner dan Kinicki (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Keterkaitan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dapat kita lihat dari karakteristik komitmen organisasi. Menurut Indra Kharis (2010) salah satu karakteristik seseorang telah memiliki komitmen organisasi yang baik adalah adanya kemauan. Kemauan merupakan rasa peduli atau bersedianya seorang karyawan dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan itu timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta mereka terhadap organisasi, teman sepekerjaan ataupun faktor lain yang mendukung

karyawan tersebut untuk berkomitmen dalam pencapaian tujuan organisasi (Indra Kharis 2010). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019) komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberh keberhasilan pengelolaan keuangan.

BAB III

PROSEDUR PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

A. Kajian Kualitatif dalam Penerapan Good Governance

Sebuah penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Pengertian Metode Kajian menurut (Sugiyono , 2013 :138), adalah pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Kajian ini menggunakan pendekatan kajian secara kualitatif di mana kajian kualitatif sering digunakan untuk meneliti dalam bidang ilmu sosial dan terhadap permasalahan yang tidak dapat diteliti secara kuantitatif. Kajian kualitatif juga dapat menambah kekayaan referensi dalam kajian kuantitatif. Pendekatan kajian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Creswell dalam Hifni & Noven, 2015). Maka oleh karena itu penulis ingin memperoleh informasi yang mendalam mengenai kajian ini agar mampu menyajikan kajian yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kajian ini bersifat empiris dan tidak melakukan riset langsung perusahaan yang diteliti.

B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penerapan Good Governance

Kajian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Kemudian populasi dalam kajian ini adalah pihak yang berperan dalam pengelolaan dana desa yang melibatkan aparat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di Kabupaten Langkat yang nantinya diharapkan sebagai mediasi dalam bentuk pembuktian secara empiris kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan dalam pengelolaan dana desa dan menciptakan *Good Governance* pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Langkat. Dengan jumlah sampel sebanyak 240 desa dikalikan 3 orang aparat desa, sehingga diperoleh sampel sebanyak 720 orang responden.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, jenis sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber (tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan kajian yang sesuai dengan keinginan penulis. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, yang berarti diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Menurut (Sugiyono, 2013:142) teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling strategis dalam kajian, karena tujuan utama dari kajian adalah mendapatkan data.

Dalam suatu kajian diperlukan data yang akan dianalisis dan diolah untuk mencapai suatu hasil kajian. Data yang dikumpulkan juga harus merupakan data yang benar-benar valid dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kajian ini penulis melakukan pengumpulan data dan informasi kajian menggunakan proses dokumentasi dengan mengumpulkan instrument yang berhubungan *Good Governance dalam pengelolaan dana desa*. Teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan untuk memperoleh analogi yang berguna dalam perumusan teori, dan landasan dalam menganalisis data primer, serta memperkuat dugaan dalam pembahasan masalah.

D. Analisa Kajian Penerapan Good Governance

Dalam kajian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diartikan sebagai metode analisis data dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, dan melukiskan subjek atau objek yang diteliti berdasarkan fakta yang terlihat atau apa adanya (Nawawi, 1991). Menurut Spradley tahapan analisis data dalam kajian kualitatif adalah sebagai berikut analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya.

BAB IV

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

A. Good Governance

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak faktor lain. Selain itu (Sedarmayanti, 2012) juga menjelaskan good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik). Manfaat dari penerapan good governance tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat good governance ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah

pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut (Rosidi, 2010) baik buruknya pemerintahan bisa dinilai dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance yaitu, Partisipasi masyarakat (Participation), Penerapan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Keadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Visi Strategis.

Penerapan Good Governance di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Langkat telah terlaksana dengan baik. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Namun hasil tersebut belum menunjukkan nilai yang optimal. Dengan demikian masih terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan dan pelaksanaan good governance di wilayah pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerapan dan pelaksanaan Good Governance dalam suatu wilayah. Seperti yang dijelaskan oleh (Yuanida, 2010) dalam pelaksanaan tugas (task) pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu, Faktor Manusia Pelaksana, Faktor Partisipasi Masyarakat, Faktor Keuangan Daerah, Faktor Peralatan, Faktor Organisasi dan Manajemen. Selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019), diperoleh

hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mempengaruhi penerapan Good Governance. Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkompeten apabila telah terpenuhinya unsure-unsur maupun prinsip-prinsip dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang baik. Menurut Sutrisno (2011:204) prinsip-prinsip sumber daya manusia yang berkualitas adalah, Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan dan Keterampilan, Nilai, Sikap, dan Minat.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di wilayah Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya berkompeten. Ketidak tercapaian Sumber Daya Manusia yang berkompeten tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dari sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa di kabupaten langkat dalam menjalankan keajiban atau tugas-tugas yang dibebankan. Dengan demikian atas kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dari sumber daya manusia mengakibatkan tidak terciptanya Kompetensi Sumber Daya Manusia yang optimal di wilayah Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Ardiyanti & Supriadi, 2016); (Pituringih, Asmony, & Basuki, 2020) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh yang positif terhadap implementasi *Good Governance*.

C. Penggunaan Teknologi Informasi

Ketidak optimalnya penggunaan Teknologi Informasi disebabkan rendahnya pemamanfaatan, produktifitas dan pengembangan pada pengaplikasian teknologi informasi tersebut. Perolehan nilai tersebut berdasarkan tetap dari skala pengukuran termaksud dalam kategori sedang. Dengan demikian masih terdapat hambatan dalam penggaan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat. Suatu teknologi informasi berguna untuk menyatakan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi. Sutarman (2012:18). Menurut (Sutabri 2012) menyatakan bahwa "Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan. Dari penjelasan diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa untuk mencapai prinsip-prinsip *Good Governance* tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Hasil kajian ini sejalan dengan pannelitian yang dilakukan dilakukan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019), diperoleh

hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mempengaruhi penerapan Good Governance. Kemudian dikuatkan oleh Kajian yang dilakukan oleh (Suryandari, 2015) mengungkapkan bahwa teknologi informasi memberikan efek positif dan signifikan pada tata pemerintahan yang baik (*Good Governace*). Selain itu kajian yang dilakukan oleh (Pituringasih, Asmony, & Basuki, 2020) mengemukakan bahwa Teknologi informasi secara signifikan terhadap terhadap good governance.

D. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016). Berjalan atau tidaknya suatu sistem pengendalian intern yang diterapkan suatu organisasi dapat dilihat dari pelaksanaan prinsip-prinsip sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang optimal Menurut Indra Bastian (2011) pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacupada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Dari hasil pengujian deskriptif yang dilakukan, penerapan dan pelaksanaan unsure-unsur sistem pengendalian intern belum terlaksana optimal. Hasil kajian ini dikuatkan oleh kajian yang dilakukan oleh (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penerapan Good Governance. Hasil serupa dikemukakan oleh (Prabawa, Karamoy, & Mawikere, 2015) bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan good governance.

E. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah keadaan psikologis seorang pemimpin organisasi dalam memberikan keyakinan, kepercayaan dan kepatuhan dengan sikap profesional guna mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk mempengaruhi demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia mampu memotivasi setiap anggota organisasi. Dalam suatu lingkungan organisasi, seorang karyawan ataupun pegawai dapat dikatakan memiliki komitmen yang baik apabila dalam diri seseorang tersebut telah terdapat prinsip-prinsip komitmen organisasi. Prinsip-prinsip komitmen organisasi yang baik yaitu, Komitmen afektif (*Affective Commitment*), komitmen berkelanjutan (*Continuance Commitment*), dan komitmen normatif (*Normative Commitment*). Prinsip-prinsip komitmen organisasi tersebut dapat digunakan sebagai alat

pengukuran atas komitmen dari seorang pegawai. Seorang aparatur pemerintah daerah yang berkerja dalam suatu organisasi harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya. Menurut (Yuanida 2010) Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan good governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Diperlukan adanya komitmen organisasi dan manajemen yang baik, agar good government governance dapat terwujud. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Good Governance. Hasil serupa juga dikemukakan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance.

F. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dan desa yang diukur dengan menggunakan Kualitas laporan keuangan yang ada pada Desa-Desa di 137 wilayah kabupaten langkat telah memadai, namun hasil tersebut belum tercapai secara optimal. Menurut (Chabib dan Rohcmansjah 2010), salah satu prinsip pelaporan keuangan adalah transparansi. Dimana prinsip tersebut juga terdapat pada penerapan dan pelaksanaan Good Governance. Transparansi dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah

dimengerti. Ketidak optimalan dari kualitas pelaporan keuangan tersebut berdampak pada penerapan dan pelaksanaan Good Governance di wilayah Desa pada Kabupaten Langkat. Menurut (Harahap 2013), bahwa :“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019), diperoleh hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mempengaruhi penerapan Good Governance.

Menurut Harahap (2013:146), mengemukakan bahwa :“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kemudian Rasdianto (2013:21), juga mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Menurut (Setyowati 2014) salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah Kompetensi sumber daya manusia. Pendapat ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah 2017) dalam kajiannya mengemukakan faktor -faktor yang mempengaruhi

kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas aparatur sumber daya manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki dari sumber daya tersebut, kemudian kemampuan, sikap dan minat. Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan sebelumnya menunjukkan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya dimiliki aparatur Desa di Kabupaten Langkat sehingga hal tersebut mempengaruhi ketidak optimalnya kualitas pelaporan keuangan. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Wiguna, Yuniarta, & Prayudi, 2017), menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes. Selain itu kajian yang dilakukan oleh

(Wardani & Andriyani, 2017) juga menunjukkan hasil bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa.

Dalam penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip pelaporan berupa relevan, andal, lengkap, dapat dipahami dan dibandingkan serta aksesibilitas yang baik (Putra, 2013). Prinsip-prinsip tersebut akan dapat tercapai dengan adanya dukungan dari penggunaan teknologi informasi yang baik. Namun di wilayah Desa di Kabupaten Langkat, Penggunaan teknologi informasi yang optimal belum terlaksana

sepenuhnya. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Pituringih, Asmony, & Basuki, 2020) menyatakan Teknologi informasi secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan serta pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap good governance.

Didalam pelaporan keuangan, diperlukan adanya suatu pengawasan agar prinsip-prinsip pelaksanaan pelaporan keuangan dapat tercapai dan terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern merupakan proses (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20). Namun dari hasil pengujian yang dilakukan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat belum optimal. Dengan demikian hal tersebut menghambat pelaksanaan Pelaporan Keuangan yang berkualitas. Menurut Setyowati (2014), Mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal, atau faktor internal. Sistem Pengendalian Intern membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko

kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi Setyowati (2014). Hasil Kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan.

Keterkaitan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dapat kita lihat dari karakteristik komitmen organisasi. menurut (Kharis 2010) salah satu karakteristik seseorang telah memiliki komitmen organisasi yang baik adalah adanya kemauan. Kemauan merupakan rasa peduli atau bersedianya seorang karyawan dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan itu timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta mereka terhadap organisasi, teman sepekerjaan ataupun faktor lain yang mendukung karyawan tersebut untuk berkomitmen dalam pencapaian tujuan organisasi (Kharis 2010). Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019) komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Penerapan Good Governance di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Langkat telah terlaksana dengan baik. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Namun hasil tersebut belum menunjukkan nilai yang optimal. Dengan demikian masih terdapat hambatan hambatan dalam penerapan dan pelaksanaan good governance di wilayah pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat.
2. Sumber Daya Manusia di wilayah Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya berkompeten. Ketidak tercapaian Sumber Daya Manusia yang berkompeten tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dari sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa di kabupaten langkat dalam menjalankan keajiban atau tugas tugas yang dibebankan.
3. Masih terdapat hambatan dalam penggaan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat. Suatu teknologi informasi berguna untuk menyatakan catatan rinci dari

- aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya.
4. Kualitas laporan keuangan wilayah kabupaten Langkat telah memadai, namun hasil tersebut belum tercapai secara optimal.
 5. Penggunaan teknologi informasi yang optimal di wilayah Desa di Kabupaten Langkat belum terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan dana desa.

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan maka penulis merekomendasikan saran untuk:

1. Pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat agar memberikan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia di wilayah pemerintahan Desa.
2. Pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat agar lebih mengoptimalkan dan melakukan pengembangan atas penggunaan Teknologi Informasi guna mendukung pencapaian tujuan Organisasi.
3. Pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat agar meningkatkan pengawasan dan pemantauan aktifitas kegiatan pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat untuk memberikan motivasi agar minat dan loyalitas dari aparatur pemerintahan desa semakin menjadi lebih baik.

5. Pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
6. Diharapkan kepada masyarakat Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Langkat untuk meningkatkan partisipasi dalam melakukan pengawasan dan keterlibatan atas kegiatan pemerintahan desa.
7. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian serta memperluas obyek kajian, sampel yang lebih banyak, dan menambah variabel untuk mengembangkan kajian, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber acuan untuk kajian selanjutnya.

Implikasi kebijakan dari kajian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi tata kelola yang baik di lembaga pemerintah desa khusus dalam pemerintahan desa.

GLOSARIUM

<i>Governance</i>	Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non- pemerintah dalam suatu usaha kolektif.
Akuntabilitas	Dapat terjadi di semua organisasi yaitu bentuk suatu pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi.
Komitmen	Suatu perjanjian, kontrak yang melibatkan keterikatan dalam melakukan dan membuat sesuatu.
Dana	Uang yang telah disediakan untuk suatu keperluan dan pemberian yang biaya kesejahteraan dan pemberian kepada yang berhak.
Organisasi	Suatu susunan ataupun kesatuan yang terdiri dari perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu dan diadakan dengan mencapai tujuan bersama.

Kajian	Laporan yang berdasarkan kajian ilmiah terhadap suatu gejala yang kejadian maupun peristiwa yang digunakan oleh pewarta polisi.
Sampel	Sesuatu hal yang digunakan untuk menunjukkan sifat dari suatu kelompok yang lebih besar.
Analisis	Suatu penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.
Populasi	Seluruh jumlah orang yang diambil menjadi sumber pengambilan sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, K. (2006). Corporate governance and banks: The role of regulation in reducing the principal-agent problem. *Journal of Banking Regulation*, 7(1-2), 17-40. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jbr.2340003>
- Andres, P. de, & Vallelado, E. (2008). Corporate governance in banking: The role of the board of directors. *Journal of Banking and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.05.008>
- Bobirca, A., & Miclaus, P. (2007). Extensiveness and Effectiveness of Corporate Governance Regulations in South-Eastern Europe. *International Journal of Economics and Management Engineering*, 1(6), 269-274.
- Calomiris, C. W., & Carlson, M. A. (2014). Corporate Governance and Risk Management at Unprotected Banks: National Banks in the 1890s. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2390869>
- Chen, H. J., & Lin, K. T. (2016). How do banks make the trade-offs among risks? The role of corporate governance. *Journal of Banking and Finance*, 72(May), S39-S69. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.05.010>
- Demidenko, E., & McNutt, P. (2010). The ethics of enterprise risk management as a key component of corporate governance. *International Journal of Social Economics*, 37(10), 802-815. <https://doi.org/10.1108/03068291011070462>
- Devriese, J., Dewatripont, M., Heremans, D., & Nguyen,

- G. (2004). Corporate Governance , Regulation and Supervision of Banks. *Financial Stability Review*, 2(1), 95–120.
- Fernandes, A. A. R., & Fresly, J. (2017). Modeling of role of public leader, open government information and public service performance in Indonesia. *Journal of Management Development*. <https://doi.org/10.1108/JMD-12-2016-0322>
- Fernandes, A. A. R., Panjaitan, R. B., & Solimun. (2019). The effect of community and company participation and implementation of good forest fire governance on the forest fire policy in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2017-0017>
- Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 40(1–3), 3–73. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002>
- Himaj, S. (2014). Corporate governance in banks and its impact on risk and performance: Review of literature on the selected governance mechanisms. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 3(3), 53–85. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2014-0015>
- Hossain, A., Sobhani, F. A., Omar, N., Mohamad, N., & Said, J. (2019). Corporate governance, risk management and ethical investment: Evidence from banking industries. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 126–137. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p126>
- Kakanda, Mahmud, M., Salim, Basariah, & Chandren, S. (2017). Corporate governance reform and risk management disclosures: Evidence from Nigeria. *Business and Economic Horizons*, 13(3), 357–367. <https://doi.org/10.15208/beh.2017.26>
- Kanchu, T., & Kumar, M. M. (2013). Risk Management in Banking Sector - An Empirical Study. *International Journal of Marketing*, 2(2), 145–153. Retrieved from www.indianresearchjournals.com
- Kostyuk, A. N., Pizzo, M., & Mizuno, M. (2012). Corporate Governance Evolution in Banks. In *Chapter 2* (pp. 35–50).
- Limba, R. S., Hutahayan, B., Solimun, S., & Fernandes, A. (2019). Sustaining innovation and change in government sector organizations: Examining the nature and significance of politics of organizational learning. *Journal of Strategy and Management*. <https://doi.org/10.1108/JSMA-10-2017-0075>
- Lutui, R., & Ahokovi, T. (2017). Financial fraud risk management and corporate governance. *Proceedings of the 15th Australian Information Security Management Conference, AISM 2017*, 5–13. <https://doi.org/10.4225/75/5a84f10795b47>
- Macey, J. R., & O'Hara, M. (2006). The corporate governance of banks. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 14(4), 375–382. <https://doi.org/10.1108/13581980610711144>
- Mitton, T. (2005). A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis. *SSRN Electronic Journal*, (801).

- <https://doi.org/10.2139/ssrn.246030>
- Muttakin, B., Mohammad, Ullah, S., & Md. (2012). Corporate governance and bank performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 8(1), 62–68. <https://doi.org/10.22495/cbv8i1art5>
- Permatasari, & Ika. (2020). Does corporate governance affect bank risk management? Case study of Indonesian banks. *International Trade, Politics and Development*, 4(2), 127–139. <https://doi.org/10.1108/itpd-05-2020-0063>
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13(2), 195. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.614>
- Raffles, R. (2011). Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kaitannya Dengan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(3), 43268.
- Safari, R., Shateri, M., Shateri Baghiabadi, H., & Hozhabrnejad, N. (2016). The Significance Of Risk Management For Banks And Other Financial Institutions. *International Journal of Research-Granthaalayah*, 4(4), 74–81.
- Sari, M., Lubis, A. de F., Maksum, A., & Lumbanraja, P. (2018). The influence of organization's culture and internal control to corporate governance and its impact on BUMN (State-owned enterprises) corporate performance in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(2), 681–691. [https://doi.org/10.14505/jarle.v9i2\(32\).30](https://doi.org/10.14505/jarle.v9i2(32).30)
- Setiawaty, A. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(1), 13–24. Retrieved from <http://journal.febunmul.net>
- Shil, N. C. (2008). Accounting for Good Corporate Governance. *Journal of Administration & Governance*, 3(1), 22–31.
- Susilo, L. J., & Kaho, V. R. (2010). Manajemen Risiko Bebas ISO 31000 Untuk Industri Nonperbankan.
- Tjahjadi, B. (2011). Hubungan sistem manajemen risiko dengan ketidakpastian lingkungan dan strategi serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. *Majalah Ekonomi*, XXI(2), 142–154.
- Windah, G., & Arastyo, A. (2013). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei The Indonesian Institute Perception Governance (Iicg) Periode. 2(1), 1–23.
- Zarkasyi, W. (2008). Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. In *Bandung: Alfabeta*.

INDEKS

- A**
Afektif, 66, 67, 69, 70
Aktivitas, 1, 23, 30, 40, 43, 53, 54, 60, 76, 92, 102
Akuntabilitas, 23, 25, 27, 41, 64, 90, 105
Analisis, v, 87, 106
- D**
Dana, iv, v, vi, vii, 1, 8, 13, 14, 15, 71, 74, 95, 105
Data, v, 86, 87
- E**
Efektivitas, 10, 13, 14, 33, 43, 44, 54, 55, 60, 61, 80, 82, 83, 97, 99
Elektromagnetik, 57
- G**
Governance, iv, v, vi, vii, 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111
- I**
Implikasi, vi, 103
Informasi, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 73, 76, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 92, 94, 95, 96, 97, 101, 102
- K**
Karakteristik, 9, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 52, 83, 99
Komitmen, v, vi, 11, 12, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 83, 94, 99, 105
Komunikasi, 31, 56, 57, 58, 64, 79
Korupsi, 3, 4, 6, 41

O

Organisasi, v, vi, 6, 11,
12, 30, 65, 66, 68, 77,
79, 83, 90, 94, 95, 99,
102, 105

P

Kajian, vii, 12, 13, 14, 74,
75, 76, 79, 80, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 90, 91,
92, 94, 95, 96, 98, 99,
102, 103, 106
Kajian, v, 12, 13, 14, 74,
76, 77, 78, 80, 82, 83,
85, 86, 93, 99, 106
Penguasa, 2, 18
Penyelenggara, 3
Perusahaan, 7, 11, 14, 25,
28, 31, 39, 40, 45, 52,

53, 59, 60, 61, 66, 67,
69, 71, 73, 77, 86

Populasi, v, 86, 106
Praktik, 3, 4, 6, 46, 65
Publik, 1, 3, 8, 19, 24, 27,
28, 51, 61, 75, 89

S

Sampel, v, 86, 106
Sektor, 1, 21, 27, 28
Sekunder, 39, 86, 87

T

Teknologi, v, vi, 12, 14,
53, 54, 55, 56, 57, 76,
82, 92, 98, 101, 102
Teori, 87

TENTANG PENULIS



Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si, CA. Lahir di Medan tanggal 6 Juli 1977. Putri dari Drs. Soekirman Maus Paloh dan Hj. Cut Tiusma. Anak ke empat dari lima bersaudara. Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tahun 2000, lulus S2 di Program Studi Aktuaria Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2004, lulus S3 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) Medan tahun 2016. Saat ini adalah Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dan Analisa Laporan Keuangan. Aktif menulis artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.



Seprida Hanum Harahap, S.E., S.S., M.S i., merupakan tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muham - madiyah Sumatera Utara (UMSU). Lahir di Padang Sidimpuan pada 19 September 1979. Menyelesaikan S1 Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Selain itu, menyelesaikan S1 Sarjana Sastra Jurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU), sedangkan S2 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU).

TENTANG EDITOR



Dr. Jufrizen, S.E, M.Si. Lahir di Batahan, Mandailing Natal, tanggal 5 Agustus 1974. Putra dari Izhar dan Nahwani. Anak pertama dari dua bersaudara. Lulus S1 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan tahun 1998, lulus S2 di Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Medan tahun 2006, lulus S3 di Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara (USU) Medan tahun 2016. Saat ini adalah Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengampu pada matakuliah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Perilaku Organisasi. Aktif menulis artikel ilmiah jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.



Konsep *good governance* adalah sebuah kerangka yang dianggap ideal yang dikeluarkan World Bank dalam membina kedewasaan negara-negara yang menjunjung tinggi akan kebebasan atau demokrasi. Kerangka *good governance* sangat tidak menginginkan peran negara yang mendominasi setiap sektor bernegara dan berbangsa. Kehadiran masyarakat sipil (*civil society*) dan swasta (*private sector*) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari elemen penting dari konsep demokrasi modern. Kehadiran pers, LSM, kelompok penekan dan kepentingan, atau ormas, termasuk perusahaan-perusahaan yang bebas dan mandiri adalah kedudukan yang sangat penting bagi kestabilan politik, ekonomi dan hukum di suatu negara. Baik pada tataran negara, maupun pada tingkat pemerintahan yang paling rendah seperti pemerintahan desa maka kehadiran kerangka *good governance* juga sangat dibutuhkan. Misalnya dalam pengelolaan kebijakan Dana Desa.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP, maka *good governance* setidaknya harus menjamin akan terciptanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum yang jelas. Maka dengan kedudukannya sebagai negara yang mengadopsi demokrasi modern dengan sebutan demokrasi Pancasila-nya, maka sudah seharusnya pengelolaan Dana Desa menjamin akan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Sebab, tak bisa dipungkiri dan tak bisa terbantahkan, bahwa tindakan amoral dalam mengurus Dana Desa kerap sekali terjadi di berbagai daerah yang menjadi momok terhadap semakin suramnya masa depan dan karakter bangsa ini. Sudahlah cukup bangsa ini terpuruk dengan berbagai yang terus menyiksa rakyat tersebut.

Di dalam buku ini dijelaskan, bahwa prinsip-prinsip *good governance* tersebut diwujudkan, salah satunya, dengan upaya melibatkan perangkat teknologi informasi dalam pengelolaan, pengadministrasian dan pengorganisasian Dana Desa. Kehadiran e-government memang telah terbukti diyakini menjadi jembatan solusi bagi masalah inefisiensi, korupsi dan berbagai manipulasi. Walaupun di sisi lain rentan terhadap peretasan data misalnya, namun setidaknya kehadiran teknologi informasi akan semakin mempermudah masyarakat dan pemerintah itu sendiri dalam mengakses dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan, Sumatera Utara
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Email: umsupress@umsu.ac.id

